

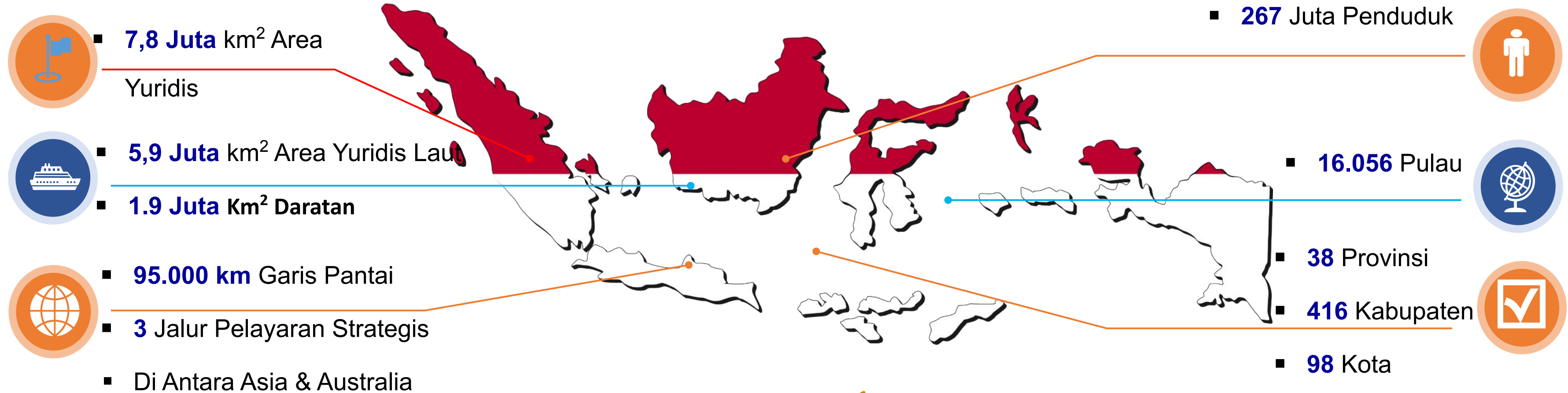


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEBIJAKAN & STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI LOGISTIK LAUT



Dr. Hartanto, MH, M.Mar.E



TANTANGAN



DISPARITAS

PERTUMBUHAN EKONOMI TIDAK SEIMBANG
ANTARA KAWASAN BARAT DAN TIMUR
INDONESIA

KONEKTIVITAS

DAERAH TERLUAR – DAERAH PERBATASAN –
DAERAH BELUM BERKEMBANG

BIAYA LOGISTIK

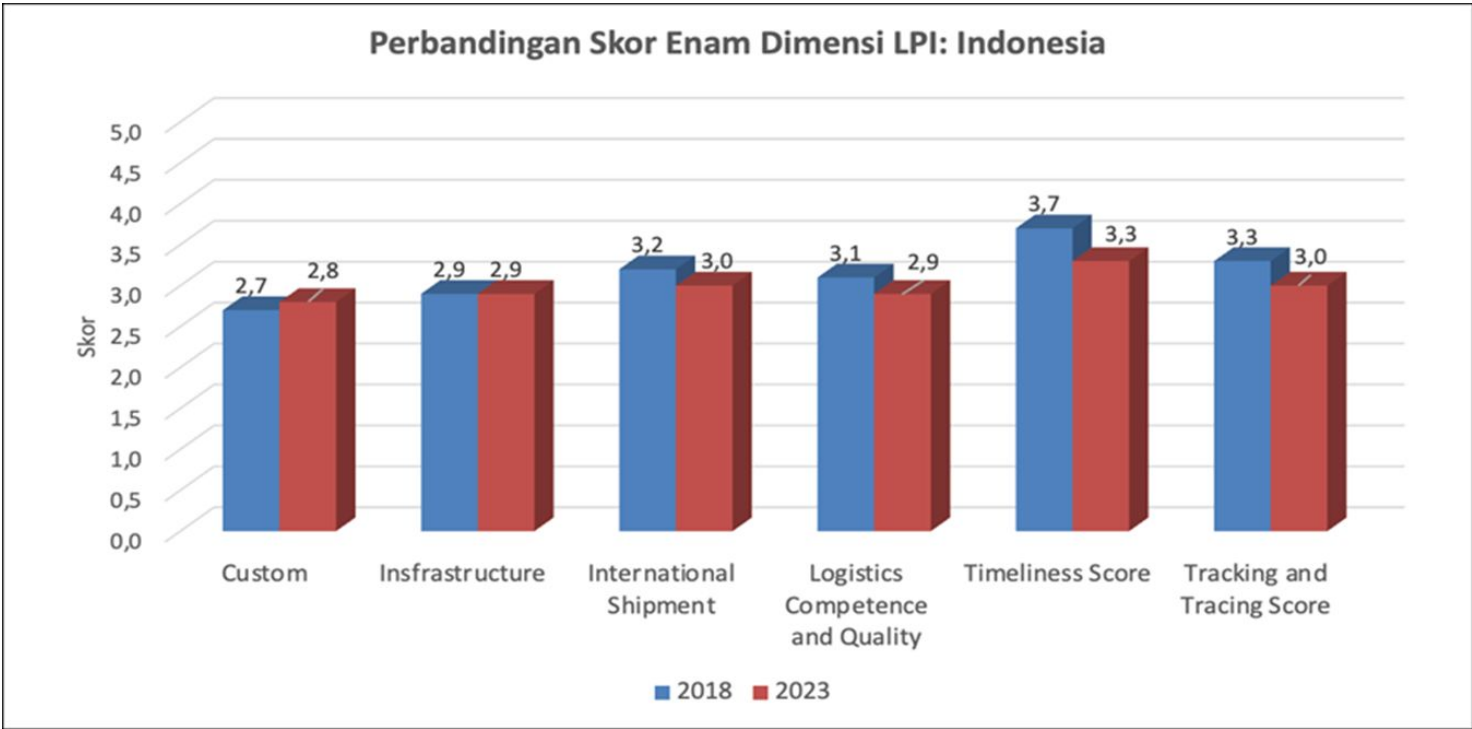
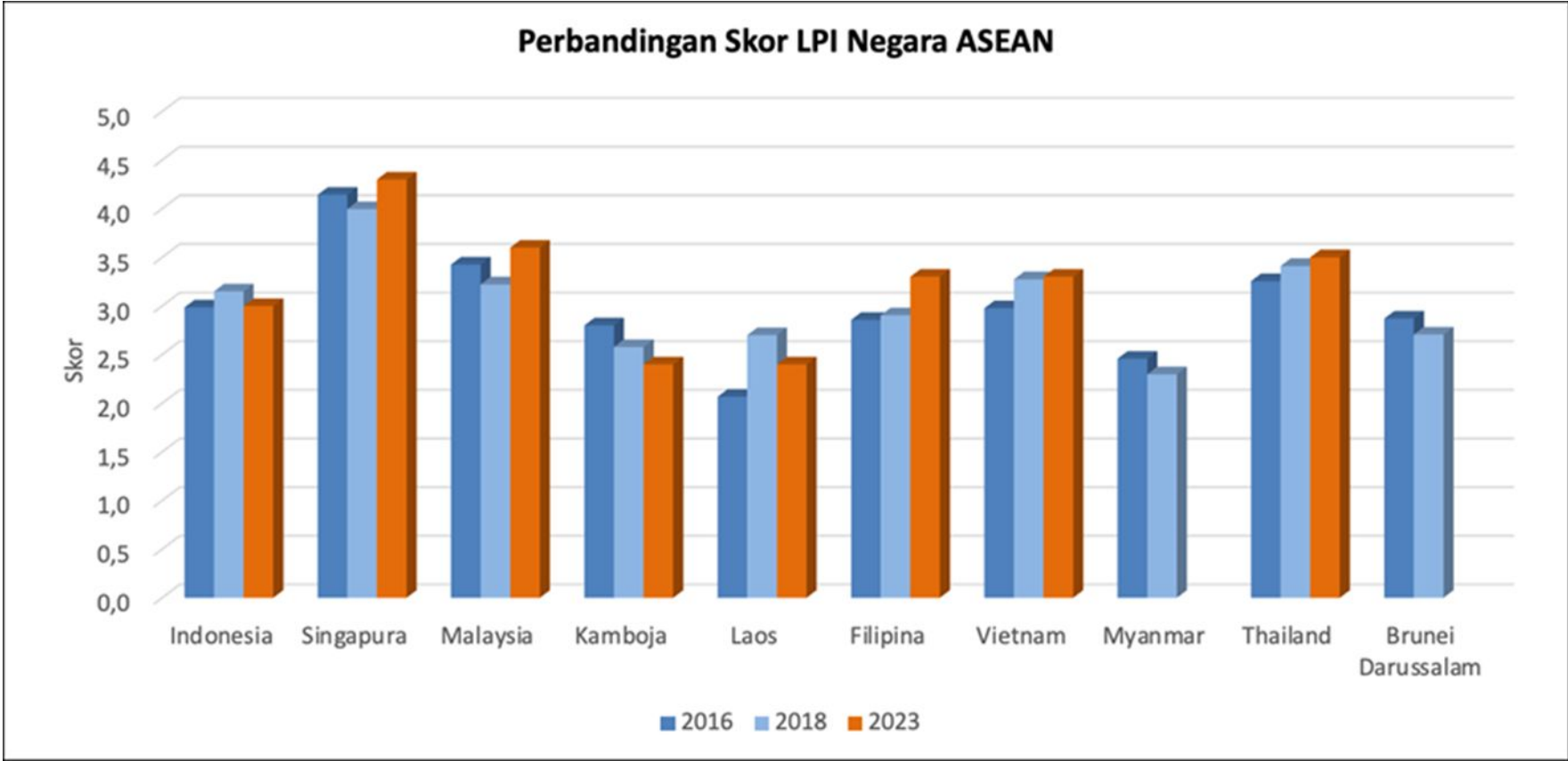
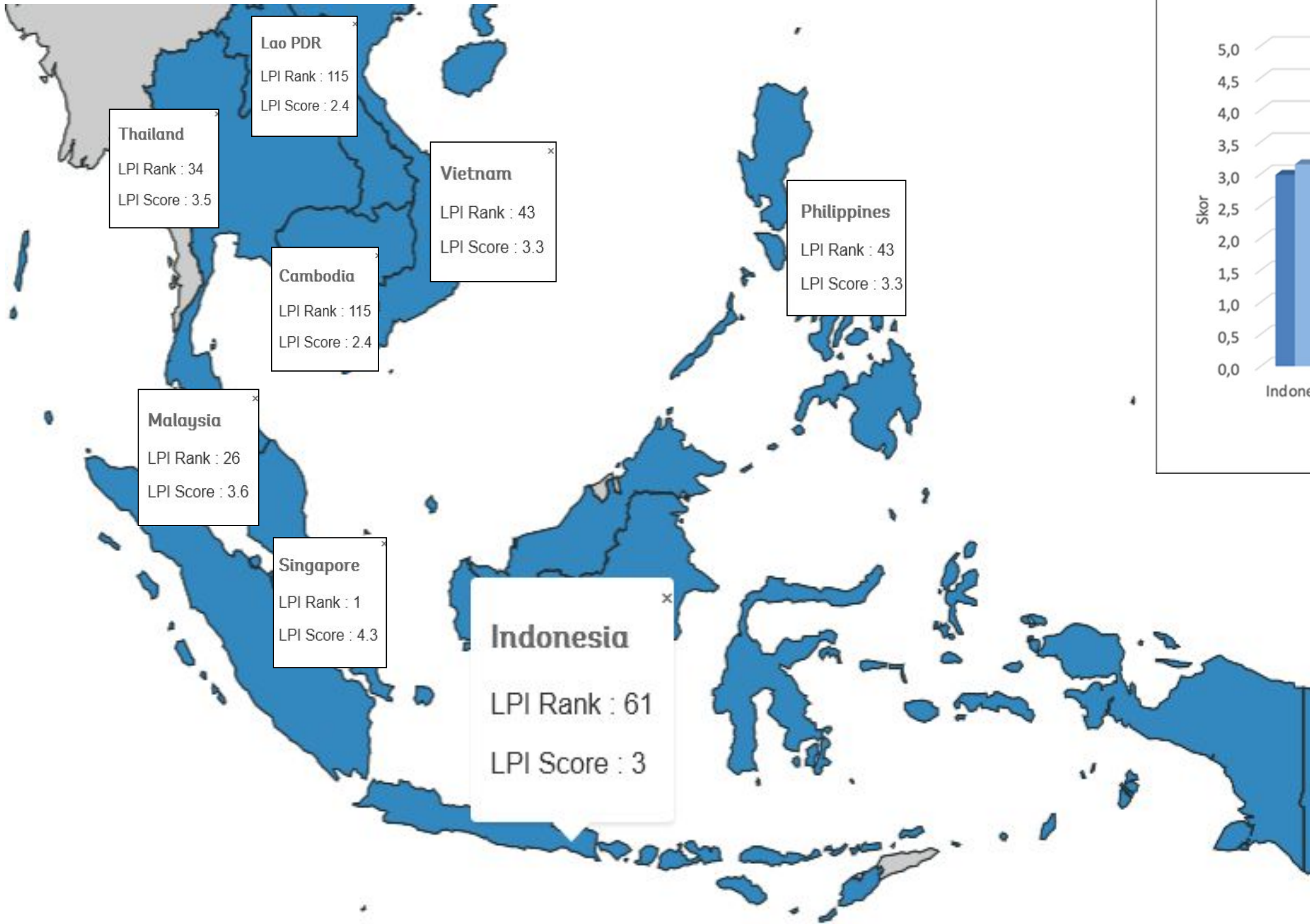
INFRASTRUKTUR KURANG MEMADAI –
KETIDAKSEIMBANGAN KARGO

FINANSIAL

DAERAH TERLUAR – DAERAH PERBATASAN –
DAERAH BELUM BERKEMBANG



ASEAN LOGISTIC PERFORMANCE INDEX (LPI)





KONDISI KONEKTIVITAS PELABUHAN UTAMA DI INDONESIA

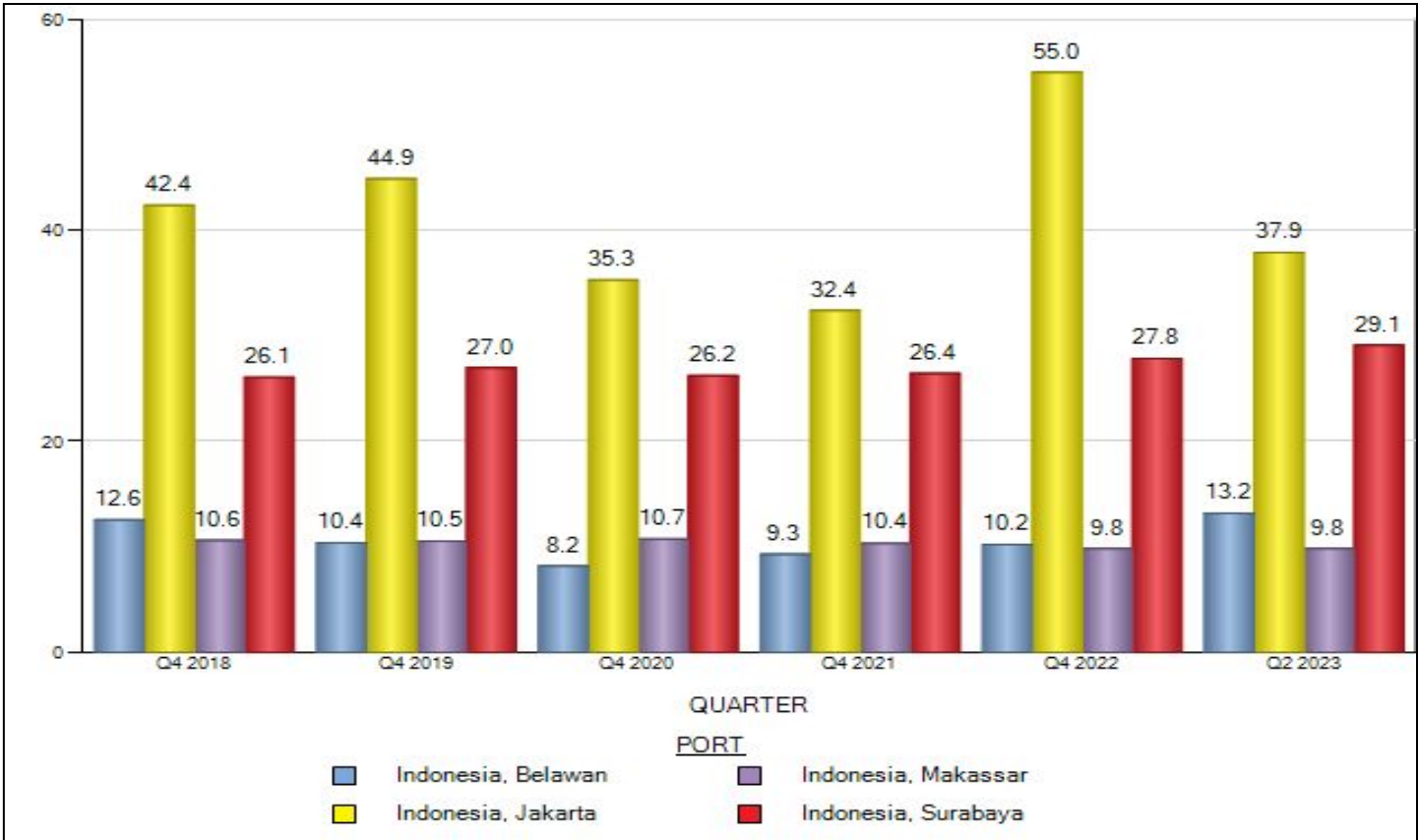


THE TOP 50 CONTAINER PORTS Source : World Shipping Council, <https://www.worldshipping.org/top-50-ports>

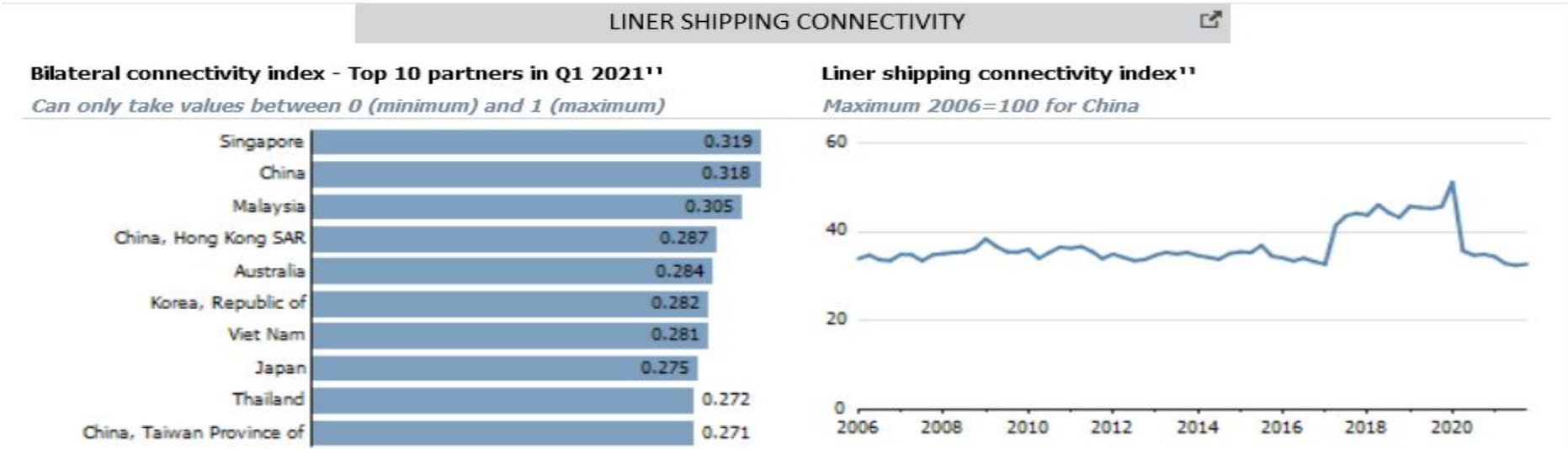
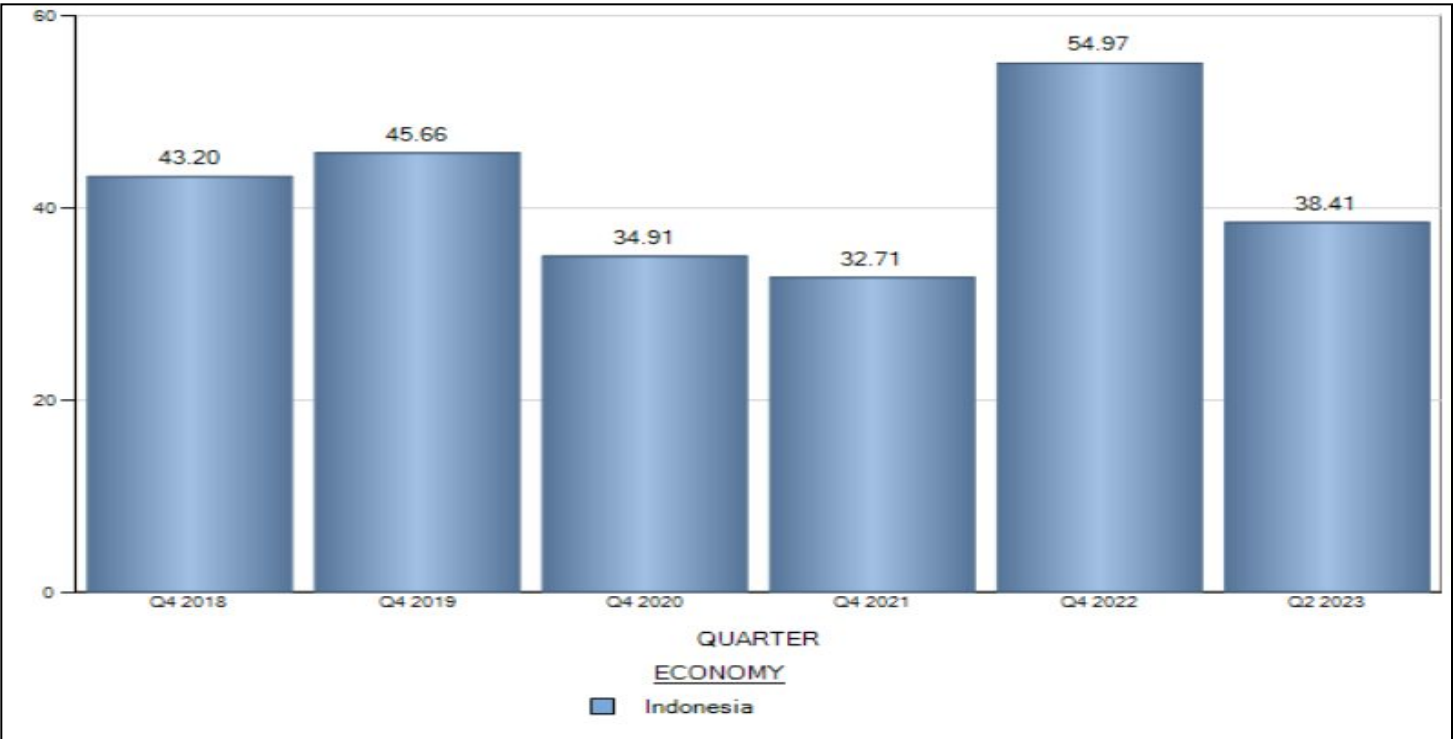
Port	Volume 2021 (Million TEU)	Volume 2020 (Million TEU)	Volume 2019 (Million TEU)	Volume 2018 (Million TEU)	Volume 2017 (Million TEU)
1 Shanghai, China	47.03	43.5	43.30	42.01	40.23
2 Singapore	37.49	36.6	37.20	36.6	33.67
3 Ningbo-Zhoushan, China	31.07	28.72	27.49	26.35	24.61
4 Shenzhen, China	28.77	26.55	25.77	27.74	25.21
5 Guangzhou Harbor, China	24.18	23.19	23.23	21.87	20.37
6 Busan, South Korea	22.71	21.59	21.99	21.66	20.49
7 Qingdao, China	23.71	22.00	21.01	18.26	18.3
8 Hong Kong, S.A.R, China	17.8	17.95	18.30	19.6	20.76
9 Tianjin, China	20.27	18.35	17.30	16	15.07
10 Rotterdam, The Netherlands	15.3	14.35	14.82	14.51	13.73

23 Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia	6.85	6.17	7.6, 6.81**	7.64	6.09
--------------------------------------	------	------	-------------	------	------

PORT LINER SHIPPING CONNECTIVITY INDEX



LINER SHIPPING CONNECTIVITY INDEX



Source : UNCTAD



PERMASALAHAN LOGISTIK NASIONAL



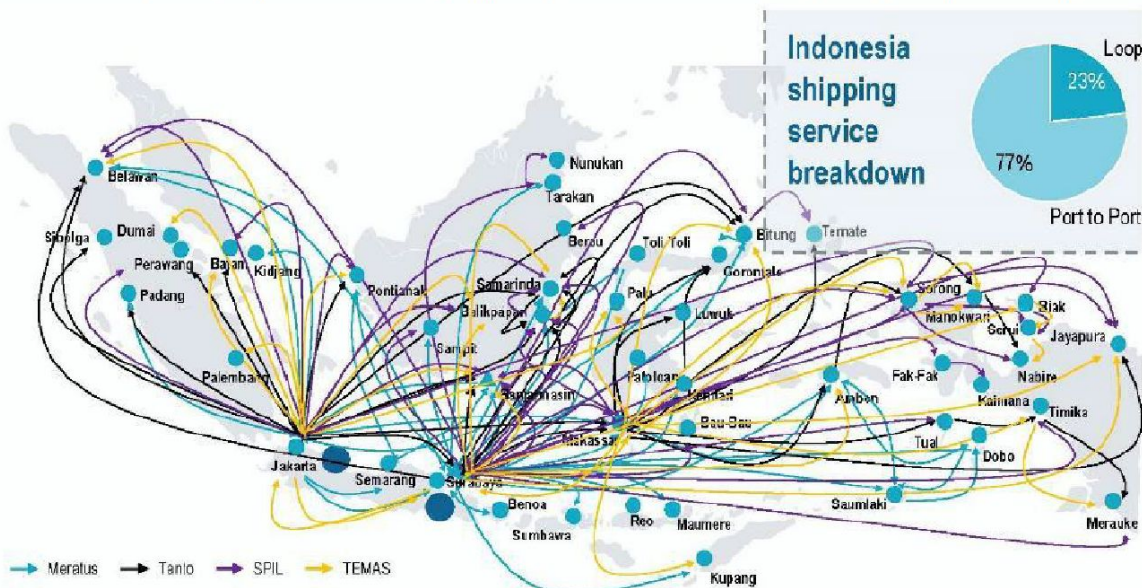
PERMASALAHAN TRANSPORTASI LAUT EKSISTING

Pertumbuhan muatan meningkat hingga 14,4 juta TEU, namun 74% masih terkonsentrasi pada 4 pelabuhan utama akibat ketimpangan pengembangan pelabuhan



DOMINASI ARUS PETIKEMAS DI 4 PELABUHAN UTAMA

Dari 132 layanan pelayaran komersial yang beroperasi di Indonesia, hanya 23% berupa rute loop



HANYA 23% JARINGAN PELAYARAN YANG SALING TERHUBUNG (MEMBENTUK JARINGAN LOOP)

Beberapa pelabuhan tampak menunjukkan layanan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan rerata global

	Draft depth [m]	Waiting time [hours]	Port productivity [TEU/meter]	Berth Occupancy Ratio [%]	Max vessel size ¹⁾ [TEU]	IT [Inport]
1 Belawan	9.5	2.1	236.0	68.0	2,700.0	✓
2 Tj. Priok	12.0	0.4	785.0	28.0	3,000.0	✓
3 Tj. Perak	10.5	0.8	515.0	54.0	3,000.0	✓
4 Makassar	12.0	1.0	713.0	29.0	2,700.0	✓
5 Bitung	11.0	1.0	143.0	70.0	2,700.0	✓
6 Sorong	11.0	1.0	129.0	N/A	1,200.0	✓

1) Taken from maximum vessel size used by shipping lines

BEBERAPA PELABUHAN UTAMA MEMILIKI KONDISI TEKNIS DAN KINERJA YANG MASIH DI BAWAH RATA-RATA INTERNASIONAL



- TRANSPORT COST HINTERLAND TINGGI (50% TOTAL)
- 96% DOMESTIC FREIGHT VIA DARAT
- PLATFORM IT (SOFTWARE) TIAP PELABUHAN BERBEDA

TARGET-TARGET RPJMN 2020-2024

2,9-3,2 hari waktu rata-rata pengeluaran barang (dwelling time)

Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

Meningkatkan Standarisasi Kinerja dan Pengelolaan Pelabuhan Terpadu

-2018-
3,8 Hari

-2024-
2,9-3,2 Hari

27% Rute Pelayaran yang Saling Terhubung (loop)

Penurunan Emisi GRK 27,3 persen (2024) menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)

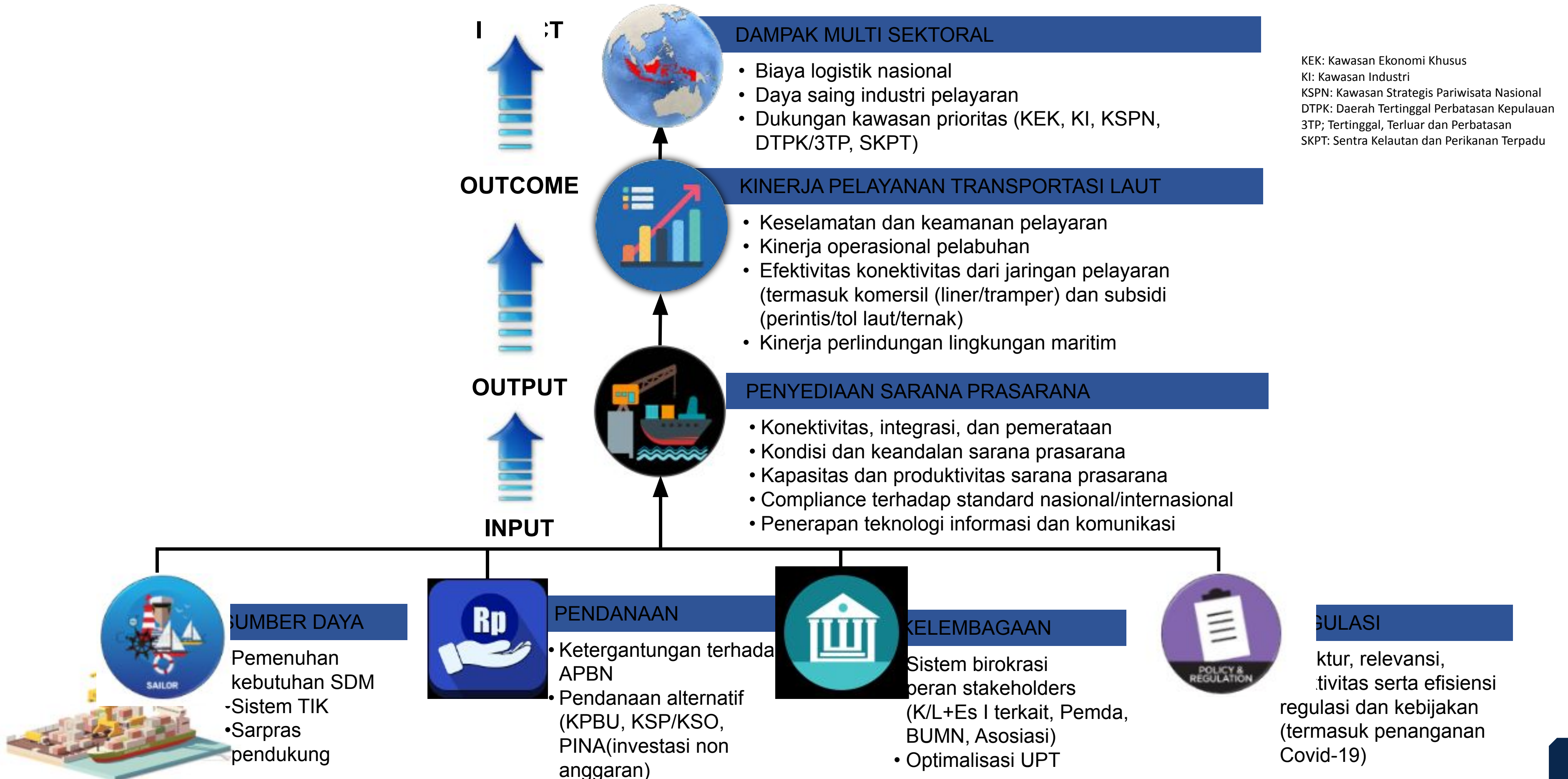
7. Rute pelayaran yang paling terhubung (loop) (%)	23	27
8. Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	1	7
9. Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	14	25

SUMBER: Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024



ISU STRATEGIS TRANSPORTASI LAUT 2020-2024

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT





ARAH KEBIJAKAN DITJEN PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2020 – 2024

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



1



PERWUJUDAN ANGKUTAN LAUT YANG MURAH, MUDAH, SIMPEL, DAN KOMPETITIF

PROGRAM : Pengembangan armada nasional, peningkatan sistem layanan angkutan laut dalam negeri dan peningkatan muatan angkutan luar negeri (*beyond cabotage*)

2
3



PENINGKATAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT

PROGRAM : Peningkatan efektivitas keperintisan, Tol Laut, Angkutan Ternak, Rede dan Pelra, Penataan jaringan pelayaran dalam negeri, Penyediaan angkutan laut penunjang pariwisata, daerah 3TP, KEK, KI dan SKPT

4



PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP REGULASI KESELAMATAN, KEAMANAN, DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

PROGRAM : Penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan kenavigasian, penguatan kelembagaan dan SDM serta implementasi regulasi internasional

5



PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DI LAUT

PROGRAM : Pemenuhan kebutuhan dan keandalan kapal patroli, Peningkatan pemenuhan SDM di Bidang PLP, Peningkatan jumlah kapal dan faspel yang memiliki sertifikat ISPS Code dan Penguatan Lembaga KPLP

6



PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN LAUT YANG BERDAYA SAING

PROGRAM : Lanjutan pembangunan/pengembangan pelabuhan, Pembangunan Pelabuhan pendukung PN (KSPN, KI, DPTK dan Tol Laut), Implementasi P3D, Pemenuhan standar kinerja pelabuhan, Modernisasi dan efisiensi bongkar muat pelabuhan, Pengembangan Green Port dan Sistem Informasi Pelabuhan



PENINGKATAN INTEGRASI DALAM PENGELOLAAN

PROGRAM : Reformasi pemangkas birokrasi, penyederhanaan regulasi, optimalisasi pengelolaan keuangan dan BMN, Penguatan SDM Transportasi Laut dan Integrasi sistem informasi perhubungan laut

Sumber : Renstra DJPL Tahun 2020-2024



PELABUHAN SEBAGAI PENDUKUNG LOGISTIK NASIONAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



SESUAI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 432 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL

636

PELABUHAN MELAYANI ANGKUTAN LAUT :

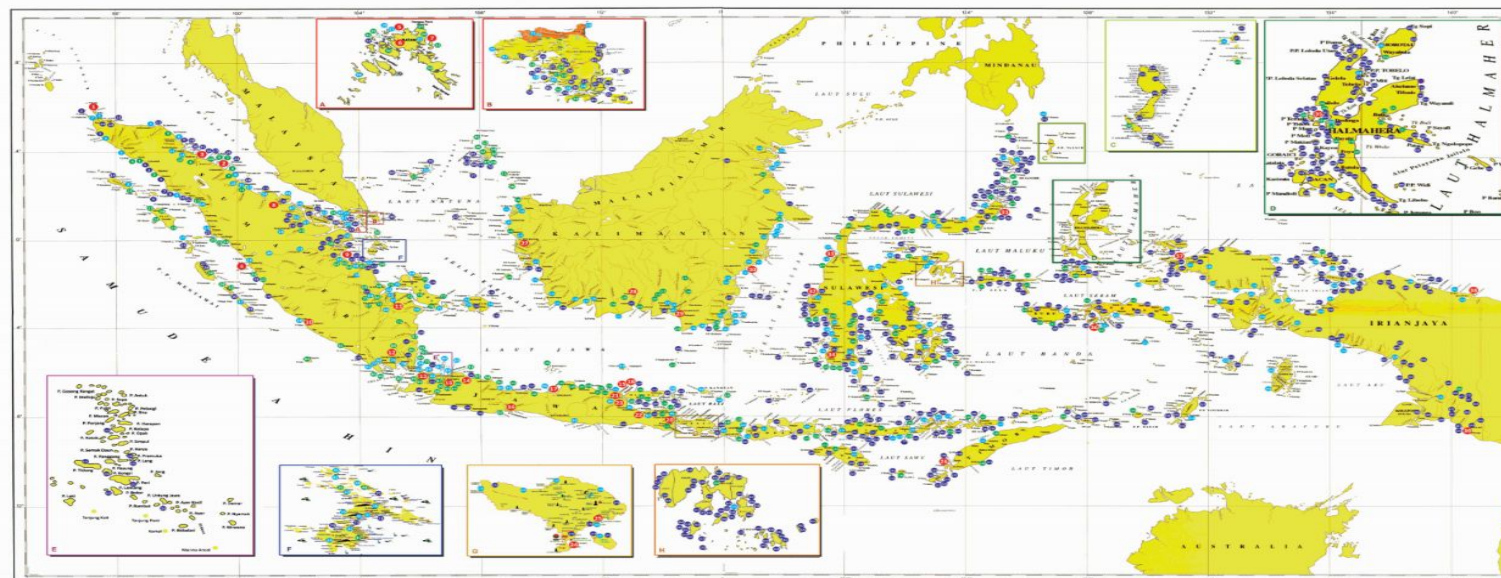
- 28 PELABUHAN UTAMA
- 164 PELABUHAN PENGUMPUL
- 166 PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
- 278 PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

1321

RENCANA LOKASI PELABUHAN

55

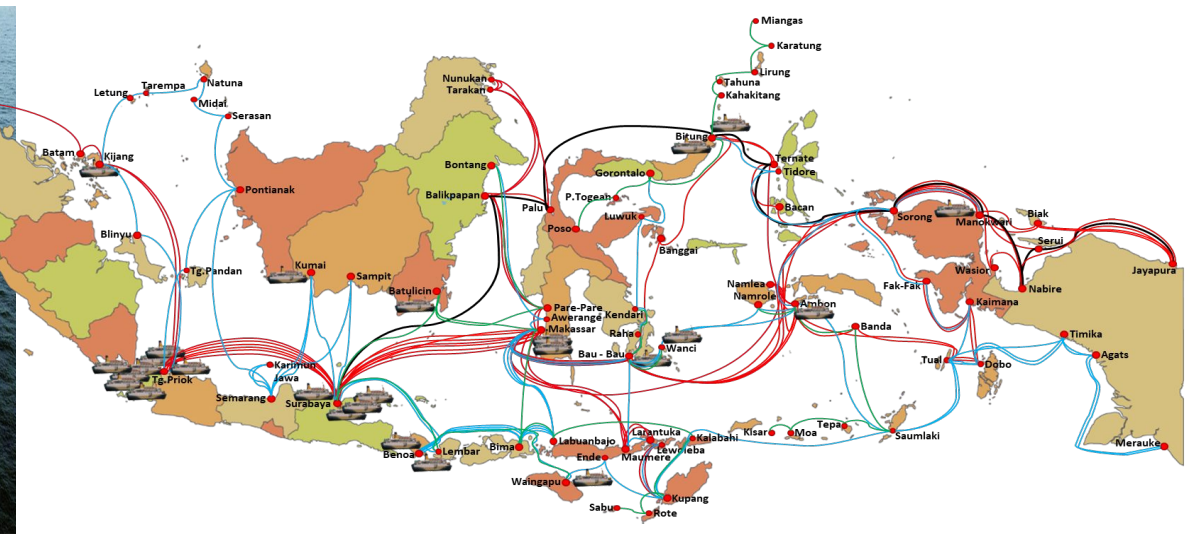
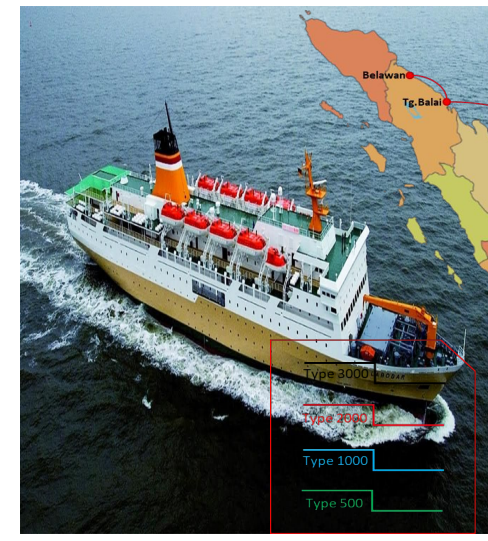
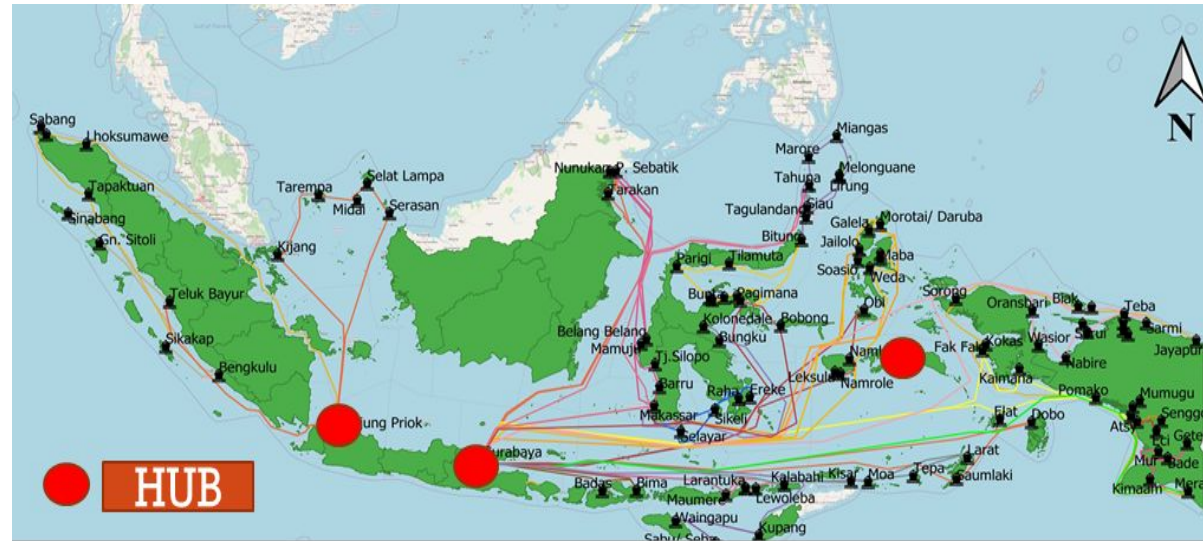
TERMINAL (BAGIAN DARI PELABUHAN UMUM)





PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT TAHUN 2023

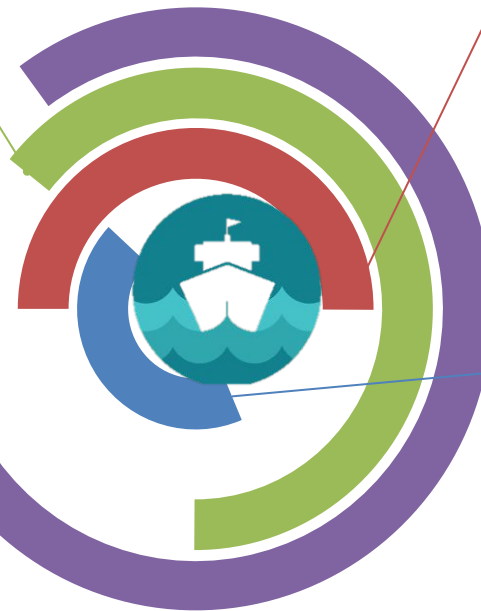
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



TOL LAUT
39 TRAYEK.



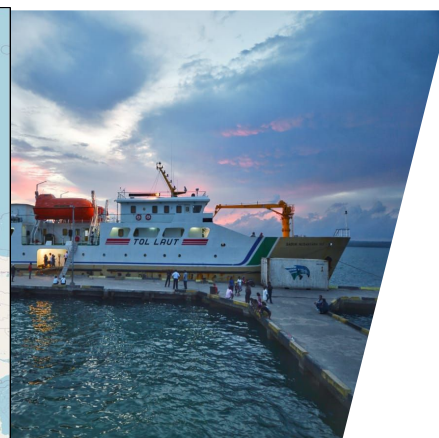
KAPAL PERINTIS
116 TRAYEK



PSO PELNI
26 TRAYEK



KAPAL TERNAK
6 TRAYEK

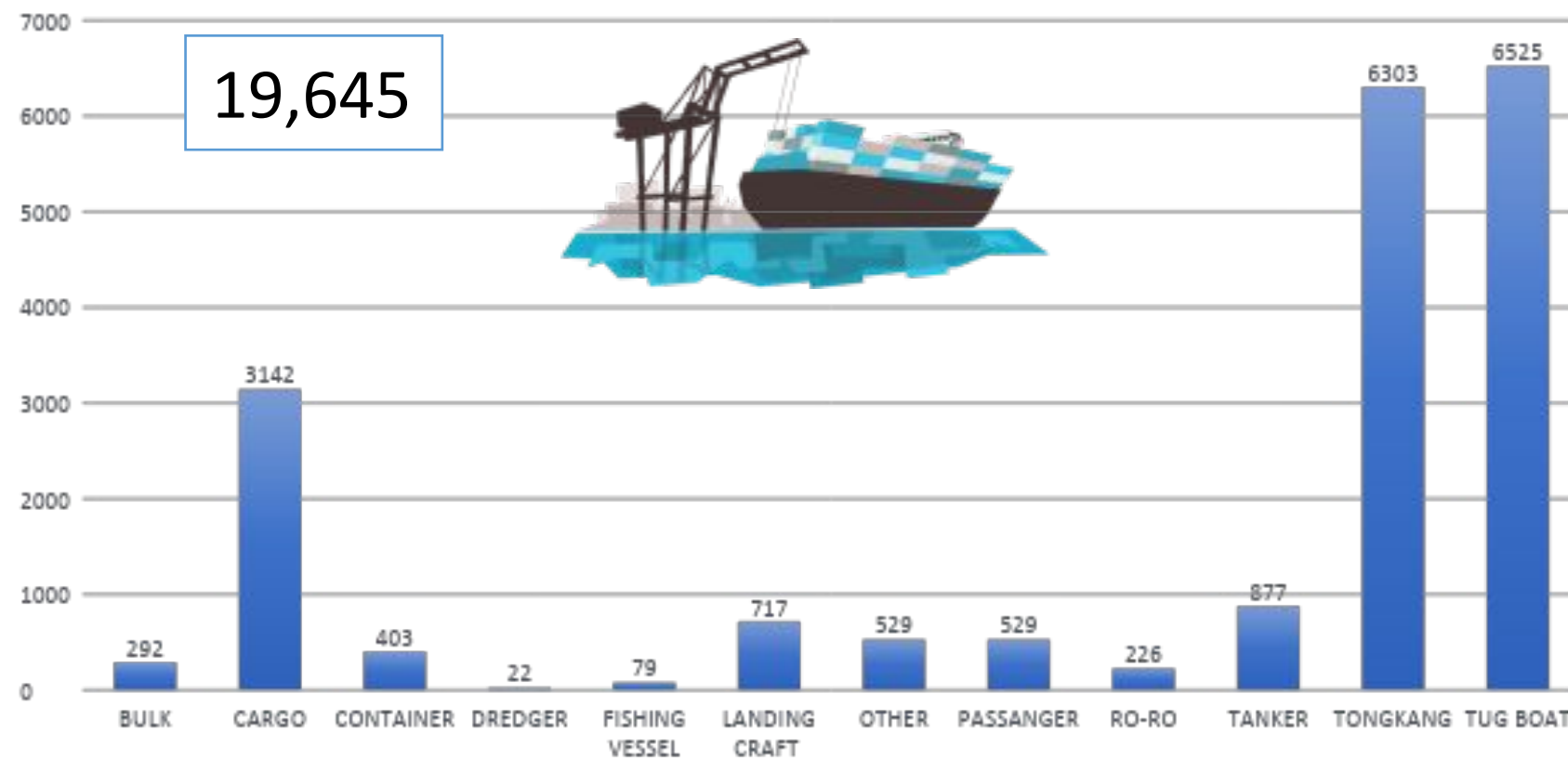




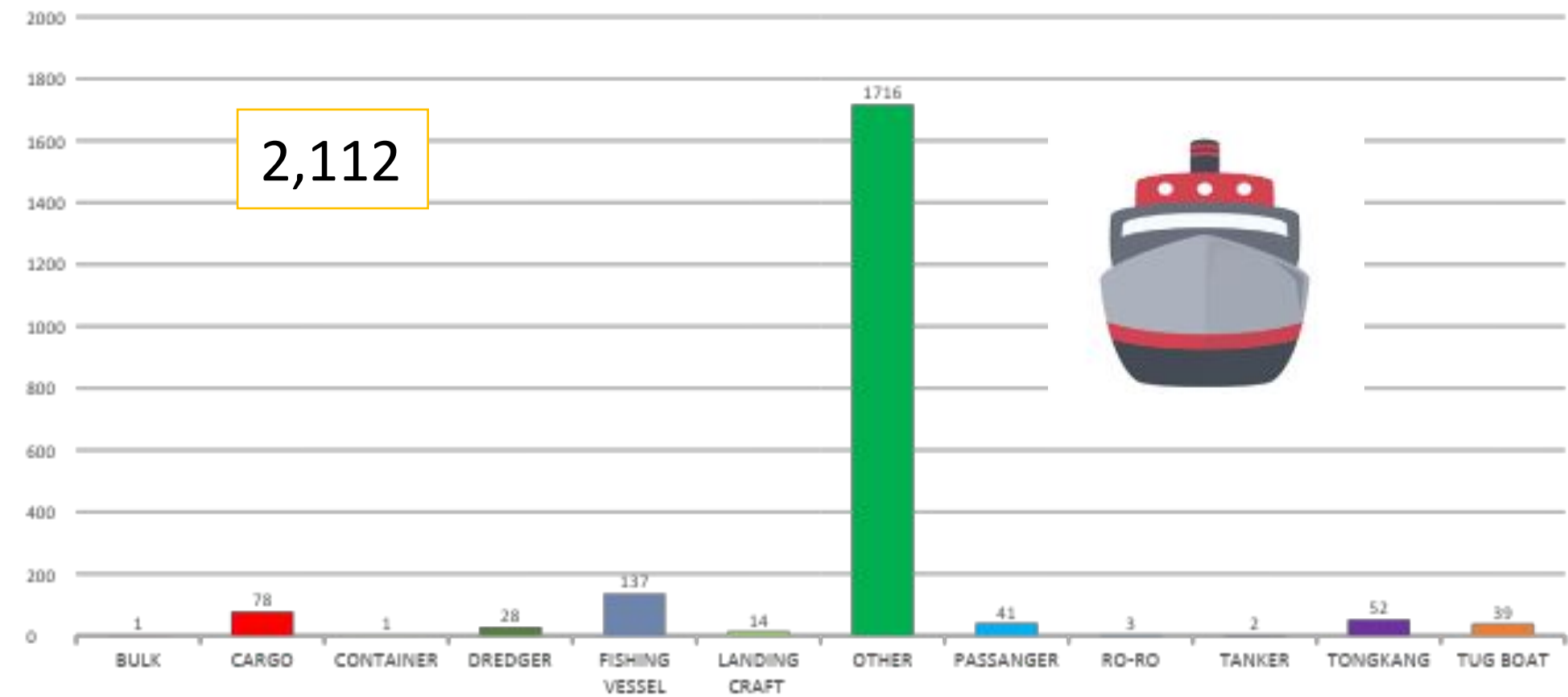
POTENSI ANGKUTAN LAUT INDONESIA



NUMBER OF SHIP FLEET (SIUPAL)

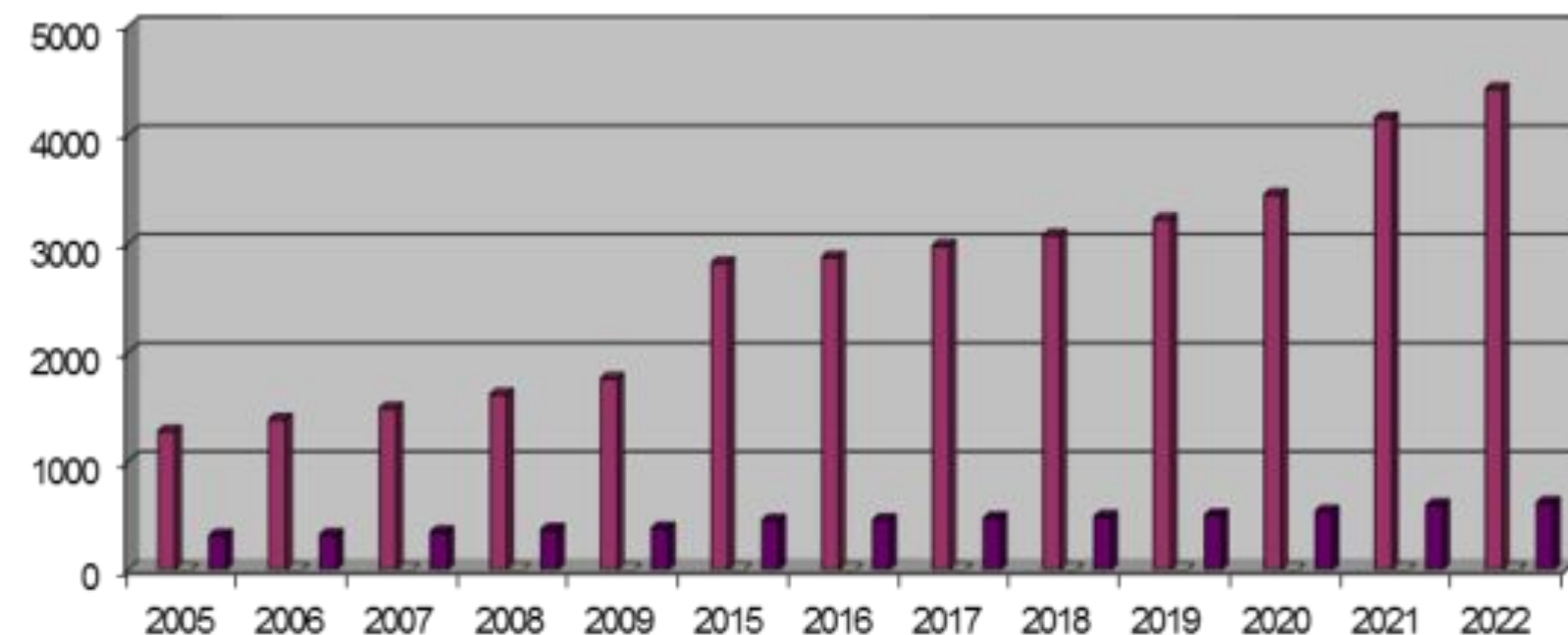


NUMBER OF SHIP FLEET (SIOPSUS)



Source : Directorate LALA
Data until November 2022

SHIPPING COMPANY DATA



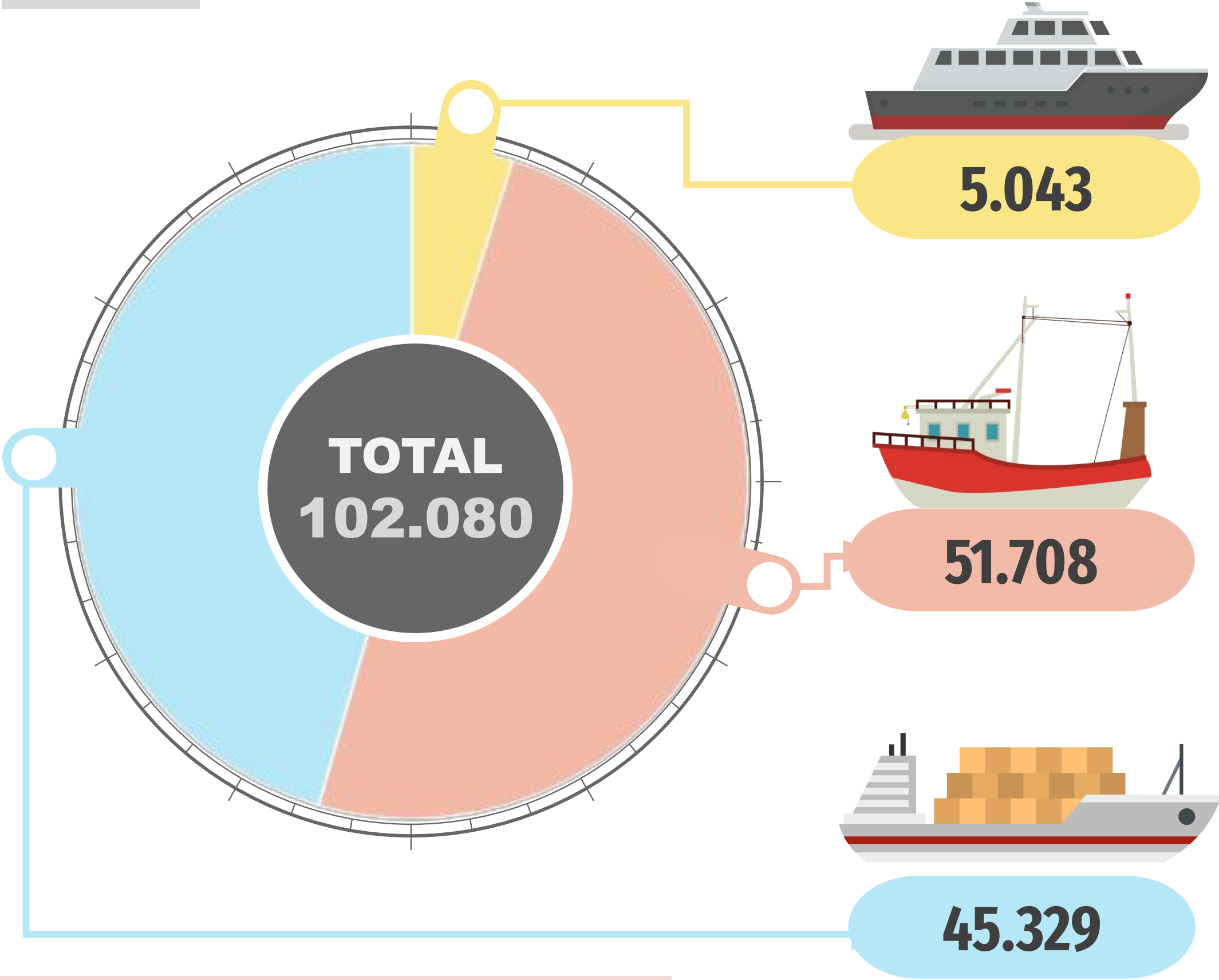


JUMLAH KAPAL TERDAFTAR DI INDONESIA PER TAHUN 2023

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



PER APRIL 2023



JENIS	RANGE OF GT	JUMLAH	TOTAL GT
KAPAL PENUMPANG	7 to 174	3.827	191.374
	175 to 499	530	161.122
	≥ 500	686	2.153.103
TOTAL		5.043	2.505.599

JENIS	RANGE OF GT	JUMLAH	TOTAL GT
KAPAL IKAN	7 to 29	28.251	547.941
	30 to 99	17.645	916.136
	100 to 299	5.331	829.291
	≥ 300	481	254.668
TOTAL		51.708	2.548.036

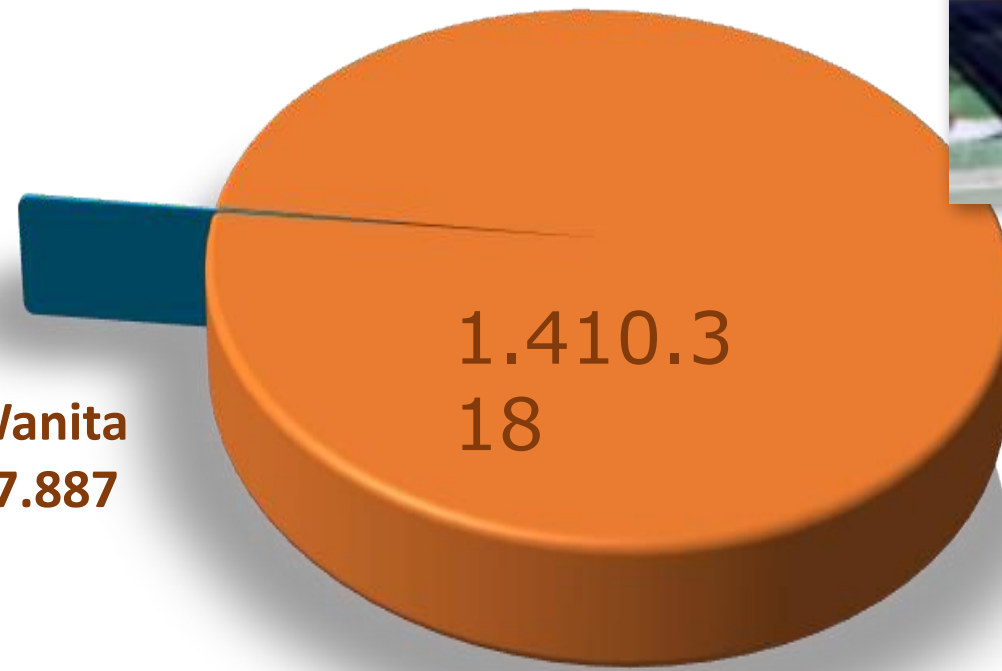
JENIS	RANGE OF GT	JUMLAH	TOTAL GT
KAPAL BARANG	7 to 174	23.280	1.592.055
	175 to 499	9.181	2.523.012
	≥ 500	12.868	44.045.294
TOTAL		45.329	48.160.361



JUMLAH PELAUT INDONESIA



Wanita
37.887



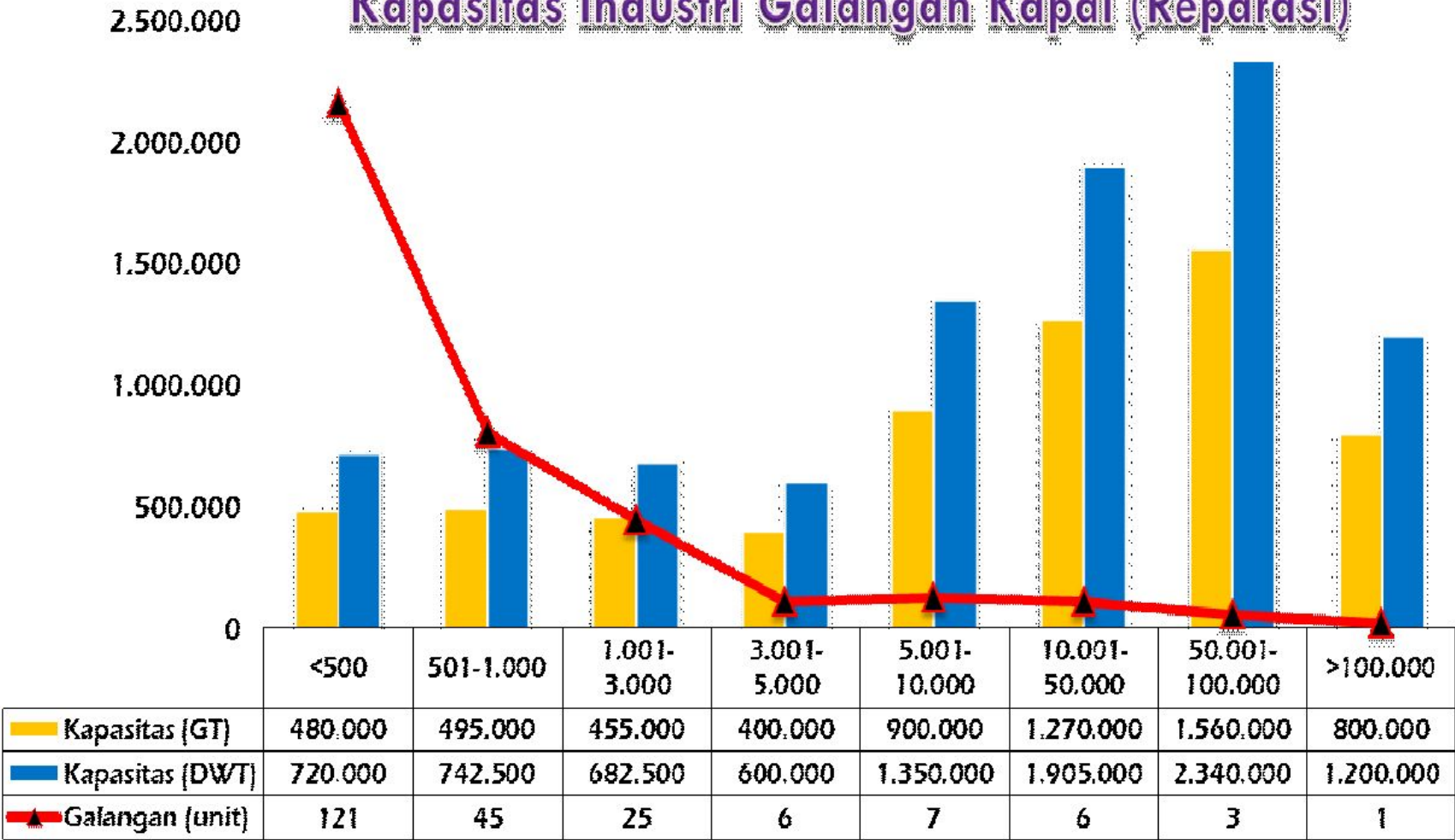
PELAUT PRIA
1.372.431



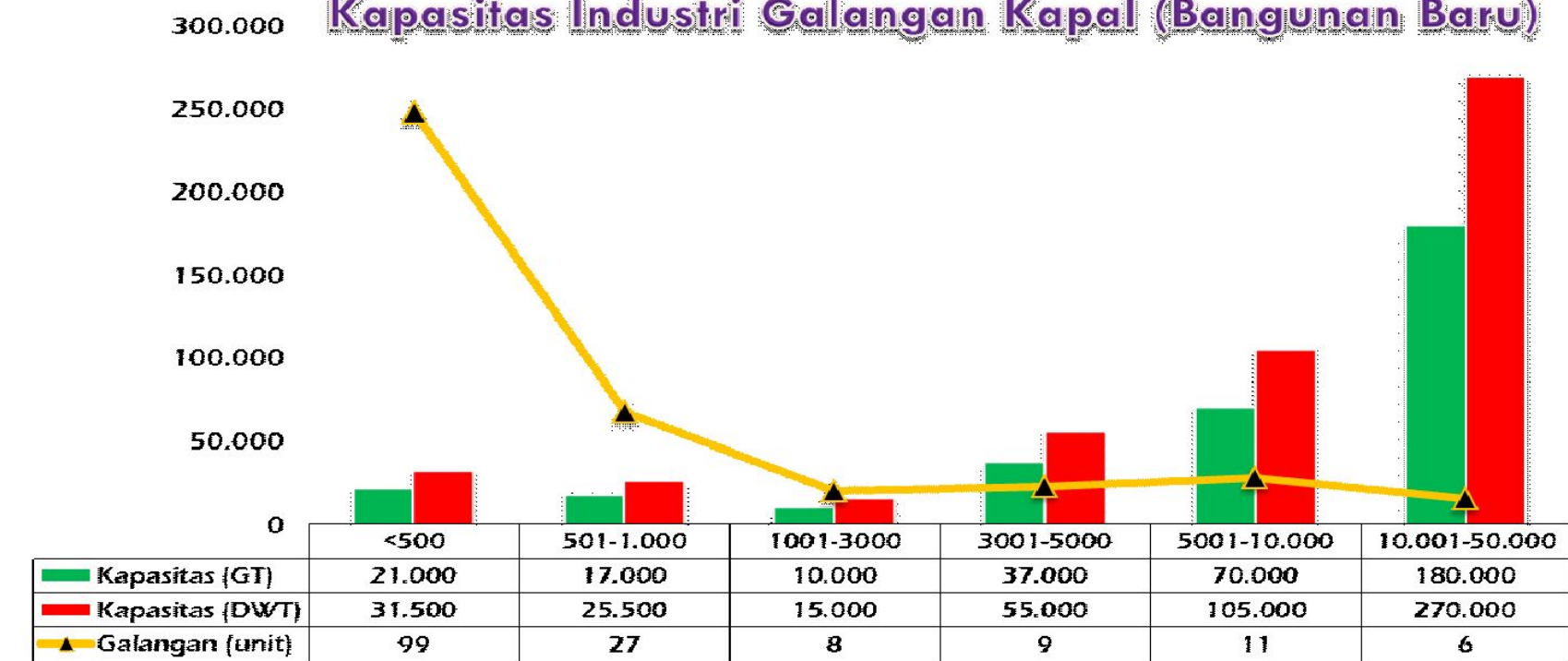
INDUSTRI PERKAPALAN INDONESIA



Kapasitas Industri Galangan Kapal (Reparasi)



Kapasitas Industri Galangan Kapal (Bangunan Baru)



Number of Dockyard : ± 250 Unit
Output Capacity : 12.000.000 DWT/year
Utilization : 85 %



Number of Shipyard : 199 Unit
Output Capacity : 1.000.000 DWT/year
Utilization : 45 %

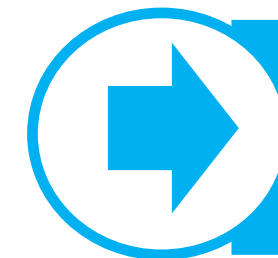
Source Ministry of Industry & IPPERINDO, 2022



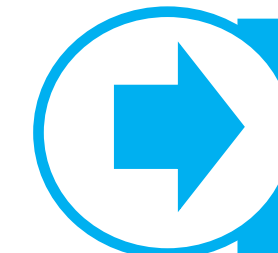
TANTANGAN INVESTASI PELABUHAN



KETERBATASAN ANGGARAN

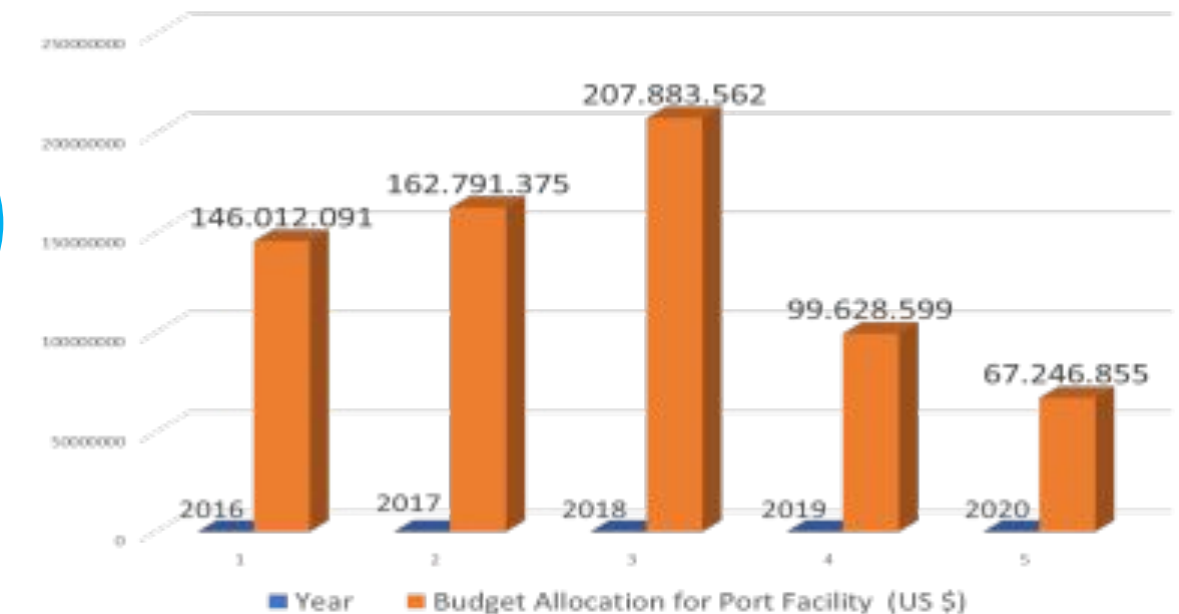


APBN TERBATAS



PARTISIPASI SWASTA

Budget Allocation for Port (2016 - 2020)



SKEMA INVESTASI PELABUHAN





DUKUNGAN TRANSPORTASI LAUT BERKELANJUTAN MELALUI DIGITALISASI PELABUHAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



4 PROGRAM UNTUK MEMBANGUN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL (NLE) (INPRES 5 TAHUN 2020)

Pilar 1

Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik



HIGHLIGHT PROGRAM

1. Pengajuan dokumen melalui *Single Submission*
2. Pemeriksaan terpadu (*joint inspection*)
3. Layanan Kepelabuhanan
4. Layanan Perizinan

Pilar 2

Kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik



HIGHLIGHT PROGRAM

1. Layanan Kepelabuhanan (Do dan SP2 Online)
2. Transportasi (*Trucking*)
3. *Shipping*
4. *Warehousing*
5. Depo Kontainer

Pilar 3

Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha logistik



HIGHLIGHT PROGRAM

1. Simplifikasi Pembayaran
2. Penerimaan Negara (*single billing*) PNBP
3. Platform
4. pembayaran

Pilar 4

Penataan tata ruang kepelabuhanan serta jalur distribusi barang



HIGHLIGHT PROGRAM

1. Penataan Pelabuhan Utama
2. Sistem Pengoperasian Tunggal Terminal Petikemas
3. Sinkronisasi jalur KA Petikemas

AKSI DJPL KEMENHUB DALAM IMPLEMENTASI DAN KOLABORASI DIGITAL DI PELABUHAN DALAM MENDUKUNG NLE

- ✓ Percepatan implementasi Inaportnet secara masif pada tahun 2023 yakni penambahan **151 pelabuhan** yang didalamnya terdapat Tersus Tuks serta Wilker yang masuk dalam pengawasan penyelenggara pelabuhan sehingga **TOTAL 260 PENYELENGGARA PELABUHAN** di bawah DJPL Kemenhub nantinya akan **full terdigitalisasi**.
- ✓ Melakukan **kolaborasi digital dengan stakeholder terkait** untuk kemudahan administrasi dan monitoring pada aplikasi SSM PENGANGKUT, verifikasi PENGAWASAN MINERBA, integrasi Manifest Domestik dan SINGLE BILLING.
- ✓ Melakukan **reformasi dan penataan ulang pada struktur organisasi kepelabuhanan** guna efisiensi dan efektifitas koordinasi di pelabuhan.
- ✓ Melakukan **pembenahan birokrasi** pada peraturan-peraturan yang berlaku bagi para pengguna jasa kepelabuhanan baik dari sisi administratif maupun pemangkasan tarif di pelabuhan.
- ✓ Melakukan **kolaborasi pengawasan** di pelabuhan bersama dengan stakeholder terkait yakni beacukai, karantina, imigrasi serta mengajak seluruh jajaran terkait di pelabuhan untuk menjaga stabilitas dan efektifitas di pelabuhan.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Kebijakan dan Pengembangan Sistem Transportasi Laut

Bandung, 25 Juli 2024



INAPORTNET

Sistem Inaportnet yang berfungsi mempermudah pelayanan kapal di pelabuhan telah berkolaborasi dengan stakeholder di pelabuhan diantaranya Kementerian Keuangan (BC, PNPB dan Pajak), INSW, BUP dan terminal operator. Monitoring dan tracing yang transparan mempermudah para agen pelayaran di pelabuhan

Data Exchange



Private Sectors

Inaportnet Dalam National Logistic Ecosystem (NLE)

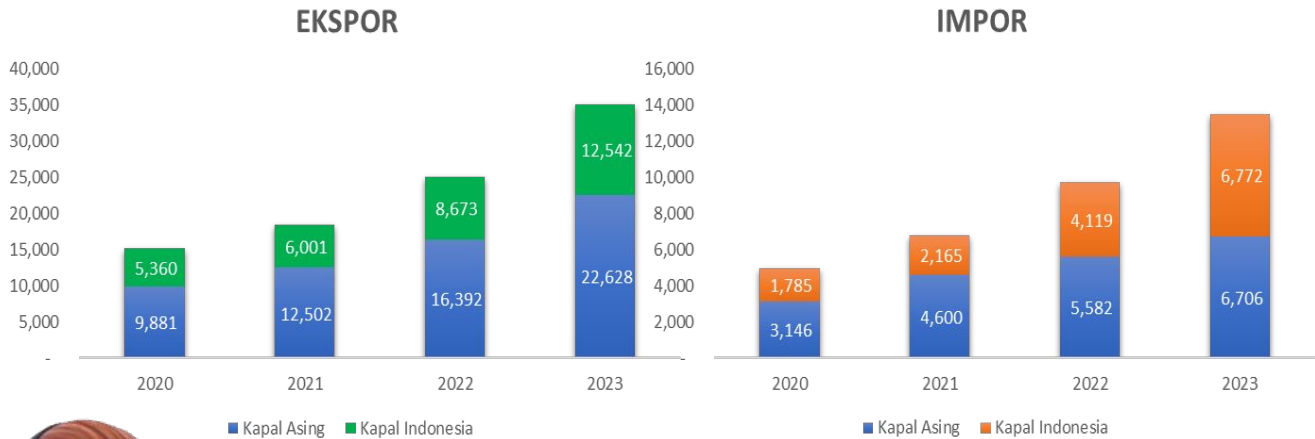


Integrasi SSm Pengangkut (SINSW) dengan Inaportnet, Agen Pelayaran cukup menyampaikan seluruh informasi terkait kedatangan/ keberangkatan kapal SATU KALI ke Sistem INSW (Single Submission Pengangkut)

Utilisasi SSm Pengangkut

Juni 2024 : **27,33%**

Untuk meningkatkan utilisasi SSm Pengangkut, telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 2 DJPL Tahun 2024 tentang Penerapan Pelayanan Secara Penuh (Mandatory) Layanan Single Submission Pengangkut (SSm Pengangkut) Satu Siklus dan Informasi Layanan Manifest Domestik.



2016 4 Pelabuhan Utama

Mulai dilakukan digitalisasi pada 4 Pelabuhan Utama secara bertahap

286,6 M

2017 12 Pelabuhan Utama

Dilakukan pentahapan pada 12 UPT kelas I. Total 16 pelabuhan

2018 Pengembangan

Inaportnet barang dikembangkan untuk pemantauan pergerakan barang di Pelabuhan

2019 16 Pelabuhan Utama

Pengembangan 16 UPT pada inaportnet hingga total 32 Pelabuhan serta pengembangan fungsi aplikasi

616,9 M

2020 22 Pelabuhan Utama

Penambahan 22 UPT – total 54 Pelabuhan dengan penambahan fungsi

2021 NLE

Penerapan Inpres 5 Tahun 2020 tentang NLE dan penambahan 22 Pelabuhan dengan total 76 Pelabuhan

778,9 M

Total Kunjungan Kapal 2016 – 2023

28.744 user

Data Exchange



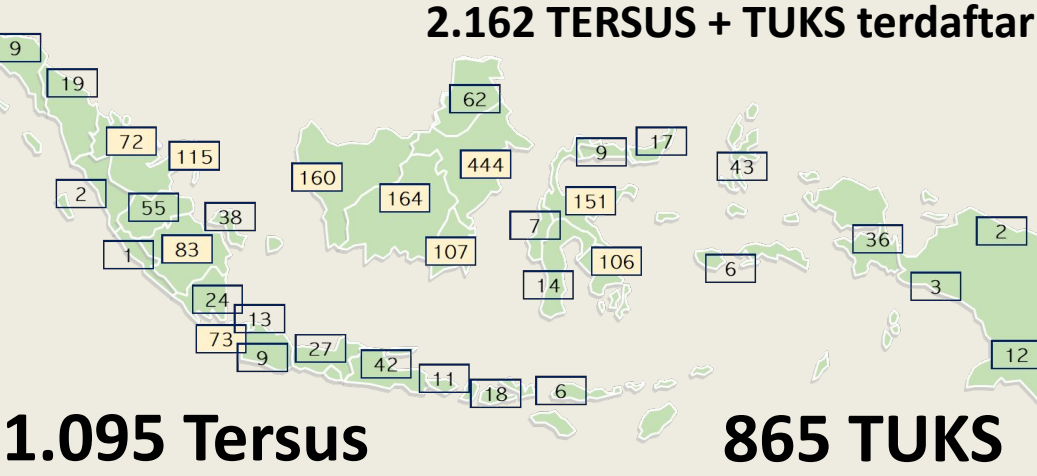
Private Sectors



Integrasi Layanan Pengangkut

Efisiensi Waktu : **71,4%**
Efisiensi Biaya : **15,8%**

Persepsi pelaku usaha berdasarkan hasil survey Prospera tahun 2023



1.095 Tersus

865 TUKS

Sebaran TERSUS dan TUKS

2023 Seluruh UPT

264 Pelabuhan dengan modul penambahan PNBPlainnya seperti jasa alih muat dantambat serta UPP juga telah di wajibkan

2T

2022 Menjadi 109

Total 109 Pelabuhan terdigitalisasi dengan mandatori pembayaran jasa rambu dan VTS

1,5 T

2021 NLE

Penerapan Inpres 5 Tahun 2020 tentang NLE dan penambahan 22 Pelabuhan dengan total 76 Pelabuhan

778,9 M

2020 22 Pelabuhan Utama

Penambahan 22 UPT – total 54 Pelabuhan dengan penambahan fungsi

2019 16 Pelabuhan Utama

Pengembangan 16 UPT pada inaportnet hingga total 32 Pelabuhan serta pengembangan fungsi aplikasi

616,9 M

2018 Pengembangan

Inaportnet barang dikembangkan untuk pemantauan pergerakan barang di Pelabuhan

2017 12 Pelabuhan Utama

Dilakukan pentahapan pada 12 UPT kelas I. Total 16 pelabuhan

2016 4 Pelabuhan Utama

Mulai dilakukan digitalisasi pada 4 Pelabuhan Utama secara bertahap

286,6 M

Penerimaan PNPB melalui Inaportnet 32,6 M



Total kunjungan kapal

Sinergi Antar K/L



Integrasi pada SSM-Pengangkut sebagai backend sistem untuk clearance in-out kapal dan single billing

Sinergi antar K/L didukung oleh KPK melalui Stranas PK melalui sehingga percepatan transformasi digital menjadi lebih terarah dan efektif.



Integrasi pada badan usaha Pelabuhan BUMN dan juga swasta untuk pengawasan pandu tunda dan pergerakan di wilayah tersus TUKS

BUP



keu



Integrasi pada data

1. Pengawasan Pajak
2. pengawasan NPWP
3. Penggalian potensi PNBP
4. Pengawasan pergerakan kapal oleh BC

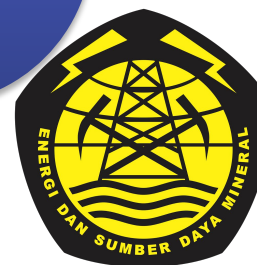


Pengawasan Devisa Hasil Ekspor (DHE)

esdm



BI



Pengawasan NTPN royalty Minerba dan pengawasan LHV Batubara dan komoditi minerba di sektor hilir

SIMBARA telah menghasilkan potensi/tambahan penerimaan negara sebesar Rp7,71triliun (s.d. April 2024)



Inaportnet



Pengajuan dokumen di forum Internasional Maritime Organization :

APPLICATION OF SINGLE WINDOW CONCEPT

pada dokumen FAL 47/INF.4 dengan judul :

Implementation of single window platform to standardize services and reduce administrative burdens at Indonesia’s ports

Indonesia Sampaikan Implementasi Inaportnet pada Sidang IMO

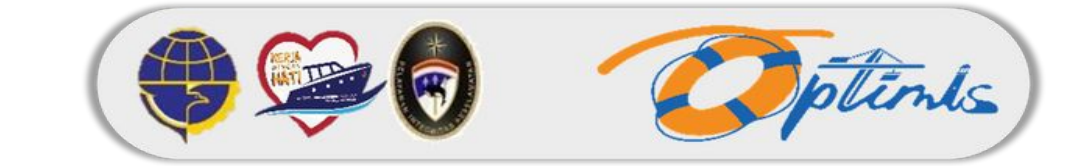


Implementasi Inaportnet di Indonesia disampaikan langsung di hadapan perwakilan negara anggota International Maritime Organization (IMO), London Inggris

Workshop on The Maritime Single Window

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan Workshop on The Maritime Single Window di Semarang pada tanggal 31 Oktober 2010 yang dihadiri oleh perwakilan dari 11 negara, dengan

Kegiatan ini digelar untuk mendorong pertukaran informasi elektronik di pelabuhan dan meningkatkan efisiensi transportasi laut, serta dalam rangka memperkuat dukungan agar Indonesia bisa kembali menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C Periode Tahun 2024-2025.



Global Integrated Shipping Information System

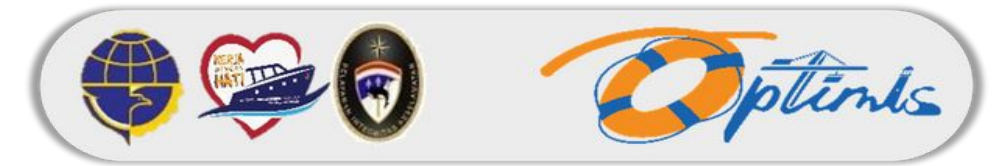


GISIS: Maritime Single Window		
You are in the Public Area. > Maritime Single Window		
Maritime Single Window / Please select Authority		
FAL 46 adopted resolution FAL.14(46), Amendments to the annex of the FAL Convention which makes the single window for data exchange mandatory in ports around the world as from 2024.		
Standard 1.3bis requires public authorities to establish systems for the electronic exchange of information to assist ship and port clearance processes. Standard 1.3quin requires public authorities to introduce arrangements to enable the provision of all the information required to a "single window" by electronic means. In addition, Standard 1.3terx requires public authorities to combine or coordinate the electronic transmission of the data required on the arrival, stay and departure of ships, so as to ensure that information is submitted or provided only once and reused to the maximum extent possible.		
To support implementation of the Convention, the FAL Committee developed FAL.5/Circ.42/Rev.3, Guidelines for setting up a maritime single window. This GISIS module provides detailed information on the implementation of the single window concept by Member States. The Guidelines can be found at IMODOCS.		
Country/Territory	Name	First Year of Operation
Albania	Albanian Marine Traffic	2023
Azerbaijan	Azerbaijan Maritime Single Window	2024
Bolivia (Plurinational State of)	AUTORIDAD MARITIMA DE BOLIVIA	
Brazil	National Single Window - Paperless Harbor (Porto sem Papel - PSP)	2012
Algeria	d	
Egypt	Maritime Single Window	2024
Spain	DUEPORT	2015
Finland	Portnet	2009
United Kingdom	UK National Maritime Single Window (NMSW)	2016
Croatia	Croatian Integrated Maritime Information System (CIMIS)	2013
Indonesia	Inaportnet	2021
India	Sagar Setu (National Logistics Portal-Marine)	2024
Ireland	SafeSeasIreland	2009

GISIS merupakan wadah penyimpanan, pemrosesan dan penyebarluasan data terkait pelayaran global. Wadah ini bertujuan untuk membantu para Negara Anggota dan Sekretariat IMO untuk menyampaikan berbagai informasi dan laporan tentang pelayaran kepada publik.

Egypt	Maritime Single Window
Spain	DUEPORT
Finland	Portnet
United Kingdom	UK National Maritime Single Window (NMSW)
Croatia	Croatian Integrated Maritime Information System (CIMIS)
Indonesia	Inaportnet
India	Sagar Setu (National Logistics Portal-Marine)
Ireland	SafeSeasIreland

Pemanfaatan Data Inaportnet



Internal

Data inaportnet dapat dijadikan pengambilan keputusan

Pengawasan peningkatan target PNPB

Pengawasan kegiatan pergerakan kapal di pelabuhan

Pengawasan kepatuhan administrasi

Penertiban pemenuhan perijinan untuk kapal dan barang di wilayah pelabuhan

Pengawasan data pembanding pergerakan pandu tunda

Eksternal

Pemanfaatan data perpajakan oleh Ditjen Pajak untuk pengawasan pajak masuk terkait dengan kegiatan kapal

Pemanfaatan data untuk pengawasan pergerakan mineral dan batubara

Pemanfaatan pergerakan kapal di Pelabuhan oleh Bea Cukai Ditjen BC terkait dengan penyelundupan

Pemanfaatan data untuk evaluasi keluar masuk kapal asing dan nasional oleh Bank Indonesia

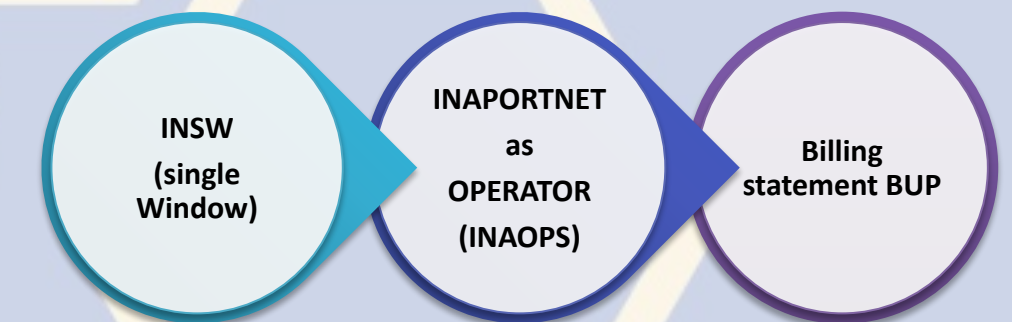
Pemanfaatan pengawasan pergerakan distribusi data kapal terkait kegiatan tol laut oleh Kemendag

Inaportnet as INAOPS

Merupakan aplikasi yg terintegrasi dengan inaportnet sebagai **wadah bagi pelaku usaha di bidang kepelabuhanan (BUP Pemanduan dan atau BUP Kepelabuhanan)** yang belum memiliki sistem yg terintegrasi dengan Inaportnet dalam menjalankan layanannya.

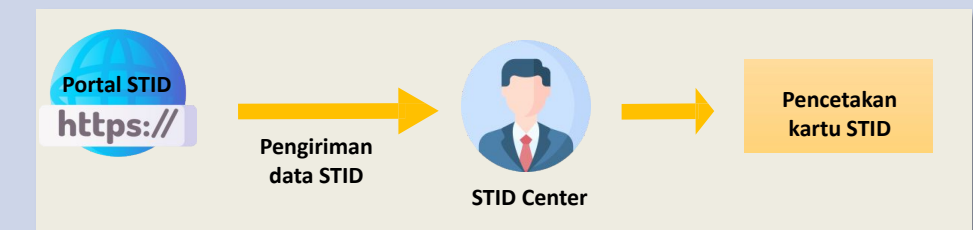
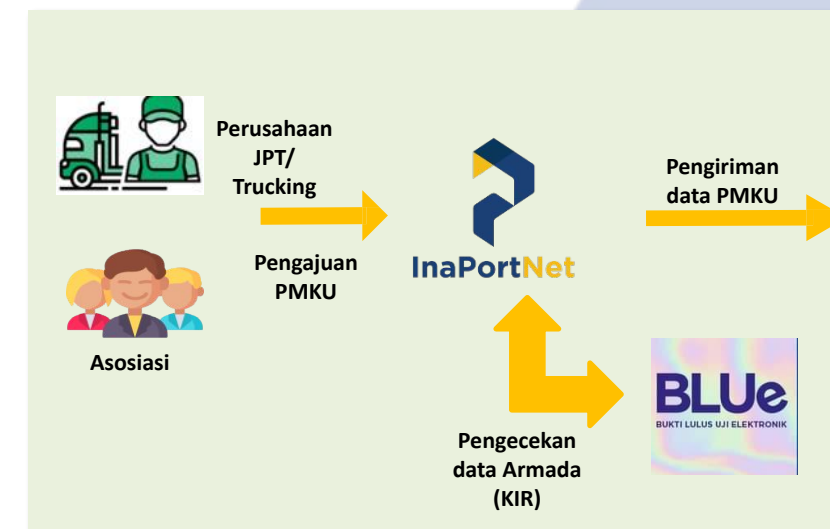
Dengan adanya inaops ini diharapkan **percepatan digitalisasi di pelabuhan** khususnya pada BUP **lebih cepat** tercapai dan **terintegrasi** dengan layanan pemerintah lainnya di bidang logistik

Pelayanan BUP terstandar di seluruh pelabuhan



Rencana Integrasi Inaportnet dengan BLUe (Ditjen Darat)

Regulator



Operator pelabuhan

Pengawasan kegiatan truk terintegrasi di area pelabuhan

Inaportnet x SIMBARA

1. Kementerian Perhubungan fokus pada penerapan keselamatan dan keamanan pelayaran, dimana Penyelenggara Pelabuhan akan memverifikasi warta kedatangan dan keberangkatan kapal sesuai dengan usulan dari shipper.
2. Verifikasi dilakukan melalui integrasi sistem Simbara dengan Inaportnet, untuk pengajuan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) dan Surat Persetujuan Berlayar.
3. Selain itu, Kementerian Perhubungan telah mendorong pengawasan pemuatan batubara pada Perusahaan Pelabuhan yang telah berkonsesi bekerjasama dengan Ditjen Bea Cukai.



RENCANA PENGEMBANGAN



SSO-DJPL

mempermudah proses autentikasi bagi pengguna dengan memungkinkan mereka untuk mengakses berbagai aplikasi dan layanan dengan menggunakan satu set kredensial login saja.



SATU PORTAL LAYANAN PUBLIK DJPL

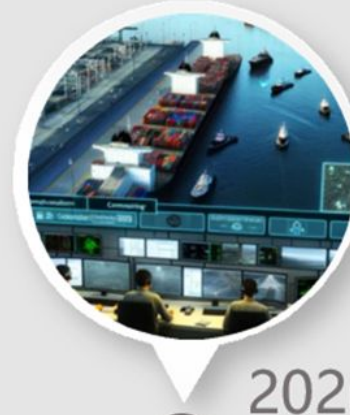


mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik ke dalam satu portal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga dapat mengakses layanan DJPL dalam satu pintu.



SATU DATA DJPL

menyediakan data, informasi dan knowledge terpusat agar dapat diakses secara cepat, efektif, dan efisien.



2027

2024

Implementasi satu credential login ke berbagai Sistem Aplikasi dengan Satu Profil dalam SSO-DJPL



1. Satu Dashboard DJPL & berbagai pakai Satu Data DJPL dalam Satu Window Pertukaran Data DJPL

2. Utilisasi data Artificial Intelligence & Machine Learning

3. Simplifikasi aplikasi DJPL



G2B

Government to Business
Layanan Kepada Pelaku Usaha



G2C

Government to Citizen
Layanan Kepada Masyarakat



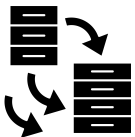
G2E

Government to Employee
Layanan Kepada ASN



G2G

Government to Government
Layanan Kepada Pemerintah



SATU WINDOW PERTUKARAN DATA DJPL

pengelolaan akses berbagi koneksi data DJPL dalam platform terpadu dengan kontrol akses, analisa statistik penggunaan, dan dengan penerapan kebijakan keamanan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TERIMA KASIH



Will you put the ship under your control...?

A: **No**



B: **Yes** ✓



Thank you ♥♥♥



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAU